

# **EVALUASI PROGRAM BURSA KERJA (JOB FAIR) DALAM MENANGGULANGI PENGANGGURAN DI KOTA MAKASSAR**

**Afdaliah Rauf**

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

**Muh. Nur Yamin**

Staf Pengajar Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar  
Jl. A.P. Pettarani Kampus UNM Gunung Sari Baru Makassar  
Email : [nuryamin1@gmail.com](mailto:nuryamin1@gmail.com)

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan program bursa kerja (job fair) dalam menanggulangi pengangguran di kota Makassar, faktor-faktor apa saja yang menunjang pelaksanaan program bursa kerja (job fair) dalam menanggulangi pengangguran di kota makassar. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.*

*Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan program Bursa Kerja (job fair) dalam menanggulangi pengangguran di kota makassar dapat dikatakan sudah baik, dari enam kriteria evaluasi kebijakan public yaitu efektivitas, efisiensi, Kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Adapun faktor yang menunjang pelaksanaan dari program bursa kerja (job fair) adalah Sumber daya manusia atau pegawai di dinas ketenagakerjaan yang mana hal ini juga merupakan faktor penghambat pada waktu yang bersamaan dikarenakan Sumber daya manusia yang masih kurang. Selain sumber daya manusia, ada juga faktor penunjang lainnya, yaitu perusahaan yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Bursa Kerja (Job Fair), jumlah pencari kerja yang banyak, tempat pertemuan yang luas, dan media promosi pelaksanaan program Bursa Kerja (Job Fair).*

**Kata Kunci:** *Evaluasi, Program Bursa Kerja (Job Fair), Pengangguran.*

## **1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia, yang terkenal dengan sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya manusia yang cukup besar dan didukung oleh sumber daya alam yang juga melimpah merupakan salah satu modal yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Sumber Daya Manusia menjadi kunci pembangunan suatu negara, sehingga kualitas dari Sumber Daya Manusia tersebut perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Pengangguran merupakan masalah pokok yang dihadapi suatu negara baik itu di negara berkembang maupun di negara maju yang tidak asing lagi terdengar di setiap daerah, baik dalam tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota, karena pada dasarnya pengangguran ialah suatu keadaan yang tidak terelakkan keberadaannya, sebab pengangguran terjadi karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja dan kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan yang tersedia di pasar kerja.

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap warga Negara Republik Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” namun seperti saat ini pada kenyataannya di Indonesia hal tersebut masih menjadi permasalahan yang begitu kompleks disebabkan oleh banyaknya jumlah

tenaga kerja Indonesia yang tidak terserap oleh lapangan kerja yang tersedia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran naik 50 ribu orang per Agustus 2019. Alhasil dengan kenaikan tersebut, jumlah pengangguran meningkat dari tujuh juta orang pada Agustus 2018 lalu menjadi 7,05 juta orang. Rata-rata jumlah pengangguran sejak Agustus 2015 tidak pernah turun di bawah Tujuh juta orang. Pada Agustus 2015 sebanyak 7,56 juta orang, Agustus 2016 sebanyak 7,03 juta orang, dan Agustus 2017 sebanyak 7,04 juta orang. (Safir, 2019)

Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,01 persen, Indonesia masih berada di urutan kedua terbanyak diantara negara-negara ASEAN. Jika tidak ada Filipina yang memiliki tingkat pengangguran sebesar 5,1 persen per Juni 2019, maka Indonesia menjadi yang terbanyak. Tingkat pengangguran Indonesia masih kalah jauh dengan Negeri Jiran, Malaysia yang hanya 3,3 persen per Juni 2019 dan Vietnam yang sebesar 2,16 persen per Juni 2019. (Adharsyah, 2019)

Bank Dunia (World Bank) menyebutkan total populasi Indonesia pada tahun 2018 mencapai 267,6 juta jiwa dan merupakan peringkat empat dunia. Sementara Vietnam dan Malaysia hanya 95,5 juta dan 31,5 juta jiwa. Namun Faktanya Cina sebagai negara dengan jumlah populasi terbanyak di dunia, yaitu mencapai 1,39 miliar jiwa di tahun 2018, mampu menekan angka pengangguran ke level 3,61 persen per Juni 2019. Jadi jumlah

penduduk bukan alasan untuk tidak mampu menekan angka pengangguran.

Melambatnya pergerakan roda ekonomi membawa dampak bagi sektor ketenagakerjaan Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurung waktu enam bulan, tingkat pengangguran di Indonesia bertambah sebanyak 230 ribu jiwa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2019, terdapat total 7,05 juta jiwa yang tidak memiliki pekerjaan, jumlah tersebut meningkat 3,3 persen dari posisi Februari sebesar 6,82 juta.

Mayoritas pengangguran merupakan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Selain Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Menengah Atas (SMA) menempati peringkat kedua dengan persentase 7,92 persen, Diploma I/II/III 5,99 persen, Universitas 5,67 persen, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 4,75 persen, dan Sekolah Dasar (SD) 2,41 persen. (Valenta, 2019)

Data-data tersebut menunjukkan bahwa tugas pemerintah untuk memerangi pengangguran masih jauh dari kata tuntas. Peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia bisa berpotensi menjadi bom waktu di tengah ancaman resesi ekonomi dunia. Dengan populasi terbesar keempat di dunia dan jumlah penduduk usia produktif tinggi, pengangguran yang tinggi, bisa menjadi penghambat pemanfaatan Bonus Demografi.

Berdasarkan pengamatan peneliti Fenomena yang terjadi yaitu bahwa lapangan pekerjaan yang tersedia masih belum memadai,

dikarenakan jumlah angkatan kerja terus meningkat melebihi jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Besarnya jumlah pengangguran menimbulkan banyak masalah sosial seperti kemiskinan dan tindakan kriminalitas. Keterbatasan lapangan pekerjaan di Kota Makassar sangatlah tinggi dari tahun ketahun. Indikator masalah sosial bisa dilihat dari begitu banyaknya kalangan orang dewasa, maupun remaja hingga kalangan anak-anak yang turun ke jalan untuk mengemis, mengamen dan menjadi pedagang asongan.

Lapangan pekerjaan merupakan indikator yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Jika pengangguran terjadi maka menyebabkan berkurangnya kesejahteraan masyarakat karena tidak adanya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri sendiri maupun keluarga dalam kehidupan sehari-hari baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder.

Kota Makassar merupakan kota Metropolitan terbesar di Indonesia Timur dan sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Perkembangan Kota Makassar yang dari tahun ke tahun semakin memperlihatkan perubahan terhadap kehidupan masyarakat kota, hal ini tentu saja berpengaruh pula pada kesejahteraan masyarakat dalam hal ini masyarakat pengangguran di perkotaan memberikan gambaran kehidupan yang menjanjikan bagi sebagian masyarakat untuk mengais rezeki di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup.

Angka pengangguran di Kota Makassar lebih banyak diisi oleh

tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan lulusan Sarjana. Untuk itu Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar memfokuskan untuk memberikan banyak pelatihan-pelatihan sebagai bagian peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) agar angka pengangguran tidak bertambah. Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar mempunyai beberapa program untuk menanggulangi pengangguran di kota Makassar. Adapun program tersebut yaitu; Bursa Kerja (Job Fair), Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) / Tenaga Kerja Asing (TKA), Pembinaan Lembaga Tenaga Kerja Swasta, Penyuluhan Bimbingan Jabatan, Teknologi Tepat Guna, Padat Karya, dan Pencarian Lowongan.

Program Dinas Ketenagakerjaan untuk mengurangi pengangguran yaitu rutin menggelar Bursa Kerja. Program ini memberi kontribusi untuk mengentaskan pengangguran. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 Februari 2020 dengan salah satu pegawai di Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar mengatakan bahwa Program Bursa Kerja ini mulai dilaksanakan sejak tahun 2014 hingga sekarang, setiap tahun dilaksanakan dua kali dalam setiap tahun tetapi, jika ada anggaran tambahan kadang juga dilaksanakan sampai tiga kali dalam setiap tahunnya.

Dengan adanya Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat (2) bahwa Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang

dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Pemerintah berkewajiban dalam memperkecil angka pengangguran. Dimana pekerja berhak mendapatkan posisi yang layak ditempat kerja. Program Bursa Kerja (Job Fair) hanya mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.

Adapun Penelitian terdahulu tentang Bursa Kerja (Job Fair) yakni, Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saudari Citra Annisa, (2011) dengan judul Implementasi E-Government melalui Bursa Kerja Online pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan mengukur indikator penentu keberhasilan implementasi melalui keempat indikator tersebut dapat dilihat bahwa hubungan komunikasi anatar pemerintah sudah baik, komunikasi pemerintah kepada perusahaan dan masyarakat masih belum baik, dari segi sumber daya dan disposisi masih kurang baik, dan struktur birokrasi sudah berjalan baik, serta masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan Bursa Kerja Online tersebut dalam mewujudkan pelayanan publik. Jadi fokus penelitian ini adalah Implementasi EGovernment melalui Bursa Kerja Online di Depok.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh saudari Yosi Monikasari, (2019) dengan judul Program Pelatihan dan Job Fair dalam mengurangi jumlah pengangguran menurut perspektif ekonomi islam. Penelitian ini

memfokuskan tiga hal yakni untuk (1) Menganalisis Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tulungagung dalam mengurangi jumlah pengangguran melalui program pelatihan dan job fair, (2) Menganalisis hasil pelatihan dan job fair dalam mengurangi jumlah pengangguran oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tulungagung. (3) Menganalisa kendala dan solusi program pelatihan dan job fair dalam mengurangi jumlah pengangguran. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun hasil penelitiannya yaitu bahwa (1) Program pelatihan dan produktivitas tenaga kerja ada dua jenis yaitu berbasis kompetensi dan kemasyarakatan, sedangkan program penempatan dan perluasan tenaga kerja yaitu penyelenggaraan job fair, (2) hasil dari program pelatihan dan job fair mampu mengurangi jumlah pengangguran secara bertahap, (3) Kendala yang dihadapi peserta pelatihan kurang mengetahui adanya pelatihan, kurangnya tenaga pengajar, perusahaan tidak mengkonfirmasi lowongan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan anggaran yang tidak mencukupi.

Penelitian yang akan dilakukan ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini berfokus pada Program Bursa Kerja (Job Fair) dalam menanggulangi pengangguran. Berdasarkan uraian latar belakang maka peneliti tertarik meneliti lebih lanjut mengenai

program Bursa Kerja untuk di Evaluasi. Selain itu, lokus penelitian ini dilaksanakan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar yang masuk dalam kategori Dinas tipe A.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui

- a. Bagaimana Keberhasilan Program Bursa Kerja (Job Fair) dalam Menanggulangi Pengangguran di Kota Makassar?
- b. Faktor-faktor Apa yang Menunjang Pelaksanaan Bursa Kerja (Job Fair) dalam Menanggulangi Pengangguran di Kota Makassar? 3.

## **3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui

- a. Keberhasilan Program Bursa Kerja (Job Fair) dalam Menanggulangi Pengangguran di Kota Makassar.
- b. Faktor-faktor Apa yang Menunjang Pelaksanaan Bursa Kerja (Job Fair) dalam Menanggulangi Pengangguran di Kota Makassar.

## **4. Tinjauan Pustaka**

### **a. Konsep Kebijakan**

Dye dalam (Abidin, 2004, hal. 20– 21) mendefinisikan “kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (whatever

government chooses to do or not to do)".

Menurut Lasswell dan Kaplan dalam (Abidin, 2004, hal. 20–21) kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek (a projected program of goals, values and practices).

H. Hugh Heglo dalam (Abidin, 2004, hal. 20–21) menyebutkan kebijakan sebagai "a course of action intended to accomplish some end," atau sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu.

Jadi, dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan ialah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

#### **b. Konsep Kebijakan Publik**

Wilson dalam (Wahab, 2012, hal. 13) yang memberikan definisi kebijakan publik yaitu "The action, objectives, and pronouncements of governments on particular matters, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the explanations they give for what happens (or does not happen)" (tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah atau sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi).

Definisi lain mengenai kebijakan publik pun dikemukakan oleh W.I. Jenkins dalam (Wahab,

2012, hal. 15), yaitu: "A set of Interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve" (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para actor tersebut).

Lemieux dalam (Wahab, 2012, hal. 15) merumuskan kebijakan publik sebagai "The product of activities aimed at the resolution of public problems in the environment by political actors whose relationship are structured. The entire process evolves over time" (produk aktivitas-aktivitas yang dimaksud untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu).

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu rangkaian kegiatan atau tindakan yang mempunyai tujuan tertentu untuk mengatasi masalah yang dilaksanakan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah.

Ada tiga tipe evaluasi kebijakan publik yang didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi.

- 1) Evaluasi dipahami sebagai kegiatan fungsional. Pertimbangan-pertimbangan ini memberi kesan bahwa pertimbangan tersebut didasarkan pada bukti yang terpisah dan dipengaruhi seperti ideologi, stakeholder, dan kriteria lainnya.
- 2) Evaluasi yang memfokuskan diri pada kinerja kebijakan atau program-program tertentu.
- 3) Evaluasi yang sistematis. Program-program dilihat secara objektif untuk mengukur dampak dan tujuan yang telah tercapai. (Damanik, 2016). (Winarno, 2016. hal 30-32) Kebijakan Publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat dimana didalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik meliputi (a) penyusunan agenda, (b) formulasi kebijakan, (c) adopsi kebijakan, (d) implementasi kebijakan, dan (e) evaluasi kebijakan. Untuk lebih jelasnya, tahap-tahap pembuatan kebijakan publik dapat diuraikan sebagai berikut:
  - a) Penyusunan Agenda, Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalahmasalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi focus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.
  - b) Formulasi Kebijakan, Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalahmasalah didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternative atau pilihan kebijakan (policy alternativesl policy options) yang ada. Pada tahap ini, masing-masing actor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.
  - c) Adopsi Kebijakan, Dari sekian banyak alternative kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, consensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.
  - d) Implementasi Kebijakan, Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elite, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif

pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing.

- e) Evaluasi Kebijakan, Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.

### c. Konsep Evaluasi Kebijakan Publik

Dunn dalam (Mulyadi, 2018, hal. 85–86) Istilah Evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), katakata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada

kenyataannya mempunyai nilai, karena itu hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi.

Dunn dalam (Mulyadi, 2018, hal. 90–91) Gambaran utama evaluasi adalah bahwa evaluasi menghasilkan tuntutan yang bersifat evaluatif, karena itu evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang tidak dimiliki oleh metode analisis kebijakan lainnya yaitu, fokus nilai, interdependensi fakta-nilai, dan orientasi masa kini dan masa lampau, serta dualitas nilai. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

- a) Fokus nilai. Evaluasi adalah penilaian dari suatu kebijakan atau program dalam ketepatan pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
- b) Interdependensi fakta-nilai. Untuk menentukan nilai dari suatu kebijakan bukan hanya dilihat dari tingkat kinerja tetapi juga dilihat dari bukti atau fakta bahwa kebijakan dapat memecahkan masalah tertentu.
- c) Orientasi masa kini dan masa lalu. Karena tuntutan evaluatif diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu sehingga hasil evaluasi dapat dibandingkan nilai dari kebijakan tersebut.
- d) Dualitas nilai. Karena nilai-nilai dari evaluasi mempunyai arti ganda baik rekomendasi sejauh



berkenaan dengan nilai yang ada maupun nilai yang diperlukan dalam mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain.

(Agustino, 2008, hal. 185)

Bagian akhir dari suatu proses kebijakan yang dipandang sebagai pola aktivitas yang berurutan adalah Evaluasi Kebijakan. Evaluasi Kebijakan sebenarnya juga membahas persoalan perencanaan, isi, implementasi, dan tentu saja efek atau pengaruh dari kebijakan itu sendiri. Menurut Lester dan Stewart evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

(Dunn, 2013, hal. 28–29)

Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Jadi ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah.

(Winarno, 2016a, hal. 192)

Bila kebijakan dipandang sebagai suatu pola kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Pada dasarnya, kebijakan publik

dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi kebijakan dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Lebih singkatnya evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan.

(Winarno, 2016b, hal. 192–

193) Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. 2. Konsep Pengangguran Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun ke atas dimana terdiri dari Angkatan Kerja dan bukan Angkatan Kerja.

Pengangguran terbuka, terdiri dari:

- a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Sedangkan menurut Basuki Pujialwanto (2014:109) Pengangguran atau tuna karya adalah “istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak”.

Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dengan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Sukirno dalam (Pujoalwanto, 2014, hal. 110) pengangguran merupakan “suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut”.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pengangguran merupakan orang

yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak.

(Sukirno, 2015, hal. 331–332) Ada beberapa Tujuan dari kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran:

- 1) Tujuan bersifat ekonomi, tujuan untuk mengatasi pengangguran didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ekonomi. Dalam hal ini ada tiga pertimbangan utama yakni, untuk menyediakan lowongan pekerjaan baru, untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat dan memperbaiki kesamarataan pembagian pendapatan.
- 2) Menyediakan lowongan pekerjaan, kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran merupakan usaha yang terus-menerus. Dengan perkataan lain, ia merupakan usaha dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek penganggura dapat menjadi bertambah serius, yaitu ketika berlaku kemunduran atau pertumbuhan ekonomi yang lambat sedangkan dalam jangka panjang usaha mengatasi pengangguran diperlukan karena jumlah penduduk yang selalu bertambah akan menyebabkan penambahan tenaga kerja yang terus-menerus. Maka, untuk menghindari masalah pengangguran yang semakin serius, tambahan lowongan pekerjaan yang cukup perlu disediakan dari tahun ke tahun.
- 3) Meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, kenaikan kesempatan kerja dan

pengurangan pengangguran sangat berhubungan dengan pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat. Kenaikan kesempatan kerja menambah produksi nasional dan pendapatan nasional. Dengan demikian kesempatan kerja yang semakin meningkat dan pengangguran yang semakin berkurang bukan saja menambah pendapatan nasional tetapi juga meningkatkan pendapatan per kapita. Melalui perubahan ini kemakmuran masyarakat akan bertambah.

- 4) Memperbaiki pembagian pendapatan, pengangguran yang semakin tinggi menimbulkan efek yang buruk kepada kesamarataan pembagian pendapatan. Pekerja yang menganggur tidak memperoleh pendapatan. Maka semakin besar pengangguran, semakin banyak golongan tenaga kerja yang tidak mempunyai pendapatan. Seterusnya pengangguran yang terlalu besar cenderung untuk mengekalkan atau menurunkan upah golongan berpendapatan rendah. Sebaliknya, pada kesempatan kerja yang tinggi tuntutan kenaikan upah akan semakin mudah diperoleh. Dari kecenderungan ini dapat disimpulkan bahwa usaha menaikkan kesempatan kerja dapat juga digunakan sebagai alat untuk memperbaiki pembagian pendapatan dalam masyarakat.

## **5. Metode Penelitian**

Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah

jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara jelas dan memperoleh data lengkap serta lebih valid mengenai masalah-masalah yang akan diteliti. Jenis penelitian ini menggunakan data berupa kata-kata tertulis, uraian, yang diperoleh dari informan dan perilaku subjek yang diamati.

## **6. Hasil Penelitian**

Dalam penelitian ini kriteria evaluasi kebijakan menggunakan teori dari William N Dunn dengan kriteria evaluasi sebagai berikut:

Efektivitas (effectiveness)

Berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan atau tujuan dari diadakannya tindakan Efektifitas. Dalam suatu kebijakan publik efektivitas diperlukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari program sehingga dapat diketahui hasil yang telah dicapai seiring dengan dilaksanakan kebijakan tersebut.

Efisiensi (efficiency)

Berkenaan dengan efisiensi program yang dapat diketahui dari jumlah sumber daya yang dikeluarkan lebih sedikit dengan sasaran program yang dicapai menghasilkan hasil yang memuaskan. Dalam dimensi ini diamati indikator Efisiensi pemanfaatan sumber daya lainnya yang mencakup sumber daya keuangan, manusia, dan saranaprasarana. Kecukupan

(adequacy) Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dimaknai dengan apabila program telah mencukupi kebutuhan dari kelompok sasaran. Dalam dimensi Kecukupan ini yang diamati yaitu Kinerja

Aparatur dalam melaksanakan kebijakan program atau kegiatan apa yang telah dilaksanakan serta Kepuasan Masyarakat terhadap program atau kegiatan yang telah dilakukan. Perataan (equity) Dalam dimensi ini berkenaan dengan keadilan dan kewajiban. Perataan dalam pendistribusian bantuan dan dukungan pemerintah. Responsivitas (responsiveness) Dalam dimensi ini berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Dimensi Responsivitas ini diamati dalam dua indikator yaitu indikator Responsivitas Aparatur dan indikator Responsivitas Masyarakat. Ketepatan (appropriateness) Dalam dimensi Ketepatan dapat diisi dengan indikator keberhasilan kebijakan, dan dapat merujuk pada nilai dan harga dari tujuan program dan kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Dimensi Ketepatan dinilai dalam indikator Ketepatan Teknis Kebijakan.

Berdasarkan table 6 tersebut, rekapitulasi keenam indikator evaluasi kebijakan maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi program bursa kerja dalam menanggulangi pengangguran di kota Makassar keenam indikator tersebut dikatakan terlaksana yaitu, efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

- a. Efektifitas Hasil yang diperoleh sudah terlaksana dengan baik dan menghasilkan output yang baik pula dengan adanya program bursa kerja mampu

membantu pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan. sesuai dengan tujuan utama program bursa kerja. Dan juga kriteria keberhasilan yang bisa diukur oleh pihak dinas ketenagakerjaan adalah dengan melihat banyaknya pencari kerja yang ikut berpartisipasi sebagai peserta di program bursa kerja di setiap tahunnya.

- b. Efisiensi Hasil yang diperoleh terlaksana, dengan adanya upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai keberhasilan dan adanya faktor yang menunjang pelaksanaan program bursa kerja namun di saat yang bersamaan merupakan faktor penghambat pula serta dengan adanya ketersediaan dana atau anggaran dalam melaksanakan program bursa kerja sudah cukup dan tersedia secara khusus.
- c. Kecukupan Hasil yang diperoleh terlaksana karena pertama pencapaian target dibagi menjadi dua yaitu berdasarkan jumlah perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti program bursa kerja. Adapun jumlah perusahaan yang terdaftar sekitar 200 perusahaan di setiap tahunnya. Yang kedua berdasarkan jumlah penempatan tenaga kerja. Jumlah penempatan tenaga kerja menurun dari tahun 2016-2019. Oleh karenanya, pencapaian target belum sepenuhnya mencapai 100 %. Yang ketiga, respon yang diberikan terhadap program bursa kerja amat baik karena masyarakat sangat

antusias untuk mengikuti program bursa kerja.

- d. Perataan Hasil yang diperoleh terlaksana disebabkan tidak ada biaya bagi pencari kerja untuk mengikuti program bursa kerja, dan pelaksanaan program bursa kerja dapat dijangkau oleh sebagian besar masyarakat pencari kerja di kota makassar, serta mendapat dukungan dari pemerintah maupun swasta.
- e. Responsivitas Hasil yang diperoleh terlaksana disebabkan program bursa kerja telah memberikan manfaat dan kepuasan terhadap pencari kerja dengan banyak lowongan kerja yang tersedia.
- f. Ketepatan Hasil yang diperoleh terlaksana disebabkan program bursa kerja salah satu langkah tepat yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi pengangguran yang ada di kota Makassar.

## **7. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, tentang Evaluasi program bursa kerja dalam menanggulangi pengangguran di kota Makassar berdasarkan enam indikator evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N Dunn yaitu Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan. maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Keberhasilan program Bursa Kerja dalam menanggulangi pengangguran di kota makassar dapat dikatakan terlaksana, dari enam kriteria evaluasi kebijakan publik yaitu efektivitas, efisiensi, Kecukupan,

pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

- b. Faktor yang menunjang pelaksanaan dari program bursa kerja adalah Sumber daya manusia atau pegawai di dinas ketenagakerjaan yang mana hal ini juga merupakan faktor penghambat pada waktu yang bersamaan dikarenakan Sumber daya manusia yang masih kurang. Selain sumber daya manusia, ada juga faktor penunjang lainnya, yaitu perusahaan yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Bursa Kerja, jumlah pencari kerja yang banyak, tempat pertemuan yang luas, dan media promosi pelaksanaan program Bursa Kerja.

## **8. Implikasi**

Hasil penelitian ini terkait Evaluasi program Bursa Kerja dalam menanggulangi pengangguran merupakan bukti ilmiah akan pentingnya kebijakan penanggulangan pengangguran, agar kedepannya nanti kesejahteraan hidup masyarakat dapat lebih baik melalui program bursa kerja secara berkelanjutan. Hasil dari penelitian ini diharapkan kedepan mampu mempertahankan hasil yang dituai di tahun kemarin.

## **9. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian diatas saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

- a. Bagi Dinas ketenagakerjaan lebih meningkatkan perannya dalam penyerapan jumlah pengangguran
- b. Bagi Masyarakat atau pengangguran lebih meningkatkan kesadaran atau

kepedulian untuk mencari informasi lowongan kerja agar pengangguran tidak bertambah dan senantiasa meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan menyesuaikan kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan perusahaan agar peluang diterima bekerja diperusahaan menjadi lebih besar.

- c. Bagi perusahaan meningkatkan peran aktif untuk melaporkan jumlah penempatan tenaga kerja ke Dinas Ketenagakerjaan.

#### **10. Daftar Pustaka**

- Abidin, S. Z. (2004). Kebijakan Publik. Yayasan Pancur Siwah.
- Adharsyah, T. (2019). *74 Tahun RI Belum Merdeka dari Pengangguran dan Kemiskinan*. CNBCIndonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190817113812-4-92715/74-tahun-ri-belummerdeka—dari-pengangguran-kemiskinan>
- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Damanik. (2016). Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pelatihan Keterampilan di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Administrasi Publik*. 5(7), 1-11.
- D, Riant. N. (2004). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT Elex Media Komputindo.
- Dunn, W. N. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Hasbiyah, S. (2014). Penguatan Ekonomi dalam mengatasi pengangguran di Kota Makassar. *Jurnal Ekonomix*, 1(2), 1-12. Ikasartika, (2011). Evaluasi kebijakan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11 (2), 111 -124.
- Mulyadi, D. (2018). *Studi kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. ALFABETA, cv.
- Nawawi, I. (2009). *Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. PMN.
- Pujoalwanto, B. (2014). *Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*. Graha Ilmu.
- Safir. (2019). *Angka Pengangguran Naik Jadi 7,05 Juta Orang per Agustus 2019*. CNN. [CNNIndonesia.com/Safir](https://www.cnnindonesia.com)
- Subarsono. (2015). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar